



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 09 Juli 2026

Halaman: 5

► BANTARAN SUNGAI

Jalan Inspeksi Ditargetkan Rampung 2030

UMBULHARJO—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menargetkan pembangunan jalan inspeksi di sepanjang bantaran sungai rampung dan saling terhubung pada 2030. Keberadaan jalan inspeksi dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan warga, memperlancar akses layanan darurat, sekaligus mendukung penataan kawasan bantaran sungai.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Umi Akhsanti, mengatakan pembangunan jalan inspeksi terus dilakukan secara bertahap di sejumlah titik. Pada 2026, salah satu proyek yang tengah dikerjakan berada di kawasan Terban, tepatnya di belakang SPBU Terban. "Jalan inspeksi di Terban menghubungkan Jembatan Condolayu sampai Jembatan Sarjito, tetapi yang dikerjakan tahun ini baru di belakang SPBU Terban," katanya, Rabu (8/7).

Selain Terban, pembangunan jalan inspeksi juga dilakukan di kawasan Kotabaru, Kampung Lampion, dan Pringgokusuman. Untuk jalan inspeksi dari Jembatan Sarjito hingga wilayah Blimbingsari telah selesai dibangun dan sudah dimanfaatkan warga.

Umi menjelaskan, keberadaan jalan inspeksi tak hanya mendukung pemeliharaan sungai, tetapi juga membuka akses bagi warga yang selama ini tinggal di bantaran sungai dengan kondisi jalan yang sempit.

Menurutnya, sebagian besar kawasan bantaran sungai hanya memiliki akses berupa jalan setapak sehingga kendaraan darurat seperti ambulans maupun mobil pemadam kebakaran, sulit menjangkau permukiman. "Kalau ada warga yang sakit harus digotong dulu ke jalan utama baru bisa naik ambulans. Dengan jalan inspeksi selebar minimal tiga meter, ambulans dan mobil pemadam kebakaran berukuran kecil bisa masuk," ujarnya. Selain meningkatkan aksesibilitas, jalan inspeksi juga menjadi bagian dari upaya mitigasi bencana.

Di sisi lain, pembangunan jalan inspeksi tak lepas dari berbagai tantangan, terutama penyediaan lahan. Menurut Umi, sebagian besar lahan di bantaran sungai berstatus Sultan Grond. Sebagian lainnya berstatus hak milik (SHM) maupun hak guna bangunan (HGB).

Karena keterbatasan lahan untuk rekayasa, DPUPKP menggunakan skema konsolidasi lahan. Dalam skema ini, warga bersedia mengurangi sebagian luas tanahnya untuk pembangunan jalan inspeksi, sementara bangunan dapat dikembangkan secara vertikal. (Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005